

# PENGARUH PENYEDIAAN INFORMASI, KEMUDAHAN AKSES INFORMASI, MEKANISME PENGADUAN DAN PENINGKATAN ARUS INFORMASI TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN BANGKA

Bagas Fajriyanto Wibowo  
NPP. 30.0378

Asdaf Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: [bagasbly89@gmail.com](mailto:bagasbly89@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. M. Irwan Tahir, AP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Utilization of information technology is able to make the government more transparent and easily accessible to the public. The government website, in this case the PPID, makes access to information that was previously difficult to obtain easy to access anytime and anywhere. The PPID website itself must contain information that is relevant to the principles of transparency and openness. **Purpose:** Transparency itself has indicators in measuring transparency itself, namely the provision of information, ease of access to information, complaint mechanisms, and information flow. This study aims to see the effect of transparency indicators in influencing information transparency. **Method:** Quantitative methods are used to see the effect of these transparency indicators in influencing information transparency in Bangka Regency. With the data analysis carried out. **Result/Finding:** The results of the data analysis carried out on each indicator of transparency, namely the provision of information, easy access to information, complaint mechanisms, and increasing the flow of information show significant results, namely the indicators show results with values above the applicable provisions, so that the transparency indicator affects the transparency of public information in the Bangka regency **Conclusion:** this study has the conclusion that each transparency indicator affects the transparency of information in Bangka Regency.

**Keywords:** Information, PPID, transparency, website

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemanfaatan teknologi informasi mampu membuat pemerintah lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Website pemerintah dalam hal ini PPID membuat akses informasi yang sebelumnya sulit untuk didapat menjadi mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Website PPID sendiri harus memuat atau berisikan informasi yang relevan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan. **Hasil/Temuan:** Transparansi sendiri memiliki indikator dalam mengukur transparansi itu sendiri yaitu penyediaan informasi, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan arus informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh indikator transparansi dalam mempengaruhi transparansi informasi di Kabupaten Bangka. **Metode:** Metode kuantitatif digunakan untuk melihat pengaruh dari indikator transparansi tersebut dalam mempengaruhi transparansi. **Hasil/ Temuan :** Hasil analisis data yang dilakukan terhadap masing-masing indikator transparansi yaitu penyediaan informasi, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi menunjukkan hasil signifikan yaitu indikator menunjukkan hasil dengan nilai diatas ketentuan yang berlaku, sehingga indikator transparsansi berpengaruh terhadap transparansi informasi publik di Kabupaten Bangka. Dengan analisis data yang dilakukan maka penelitian ini memiliki **Kesimpulan:** kesimpulan bahwa masing-masing indikator transparansi mempengaruhi transparansi informasi di Kabupaten Bangka.

**Kata Kunci:** Informasi, PPID, transparansi, website

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan di bidang Teknologi Informasi (TI) dewasa ini mendorong kita untuk memanfaatkan TI hampir di setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dahulu dilakukan secara manual dan memakan waktu, sekarang dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pemerintah tentunya menginginkan masyarakat ikut andil dalam pengembangan daerah terutama Kabupaten Bangka guna mewujudkan transparansi informasi publik, sehingga kinerja pemerintah dapat dinilai sendiri oleh masyarakat. Website PPID Kabupaten Bangka seharusnya menjadi sarana tepat dalam mencari informasi terkait pemerintah yang mana masyarakat harus mampu memanfaatkan fasilitas tersebut guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik kedepannya. Pengunjung website PPID yang melakukan pengunduhan dokumentasi per tanggal 21 September 2021 sampai dengan 12 Desember 2022 sejumlah 400 orang pengunjung. Kenaikan tersebut menjadi sebuah kemajuan di dalam proses keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bangka, yang menunjukkan masyarakat telah memanfaatkan media website tersebut untuk mencari informasi terkait informasi publik yang mereka perlukan. Website PPID merupakan produk pemerintah sebagai media penyampaian informasi yang berguna untuk masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait informasi publik. Data diatas menunjukkan website PPID memberikan pengaruh terhadap keterbukaan informasi dengan menyediakan informasi yang merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait informasi publik. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap indikator transparansi dengan menganalisis indikator transparansi yaitu penyediaan informasi, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi terhadap transparansi informasi di Kabupaten Bangka.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Website PPID diperuntukan untuk transfer informasi terkait segala hal baik itu kegiatan, rancangan, maupun hasil yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan baik itu oleh masyarakat ataupun pegawai pemerintah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan informasi dengan tujuan masing-masing. Transparansi sangat diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka dengan adanya website PPID ini, masyarakat juga diharapkan peduli dan mau menggunakan website ini sebagai sarana mencari informasi yang transparan terkait dengan pemerintah Kabupaten Bangka. Penelitian ini diperuntukan untuk melihat pengaruh website PPID dengan mengukur indikator transparansi guna melihat indikator mana yang belum terpenuhi dalam menerapkan transparansi informasi publik melalui website PPID Kabupaten Bangka.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dessy Arista (2015) "Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik" penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi dalam menunjukkan eksistensi website pemerintah sebagai media keterbukaan informasi publik.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tawakkal Baharudin (2020) "Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019" penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi dalam menunjukkan tren positif pemerintah dalam keterbukaan informasi.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Kriyantono (2020) "Efektivitas Website Perguruan Tinggi Negeri sebagai Penyediaan Informasi bagi Mahasiswa" peneliti menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi dalam menunjukkan website dinilai efektif oleh mahasiswa berdasarkan beberapa dimensi.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Annisa Eka Puspitasari (2019) "Penerapan Transparansi melalui Website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" peneliti menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi tersedianya pelayanan yang transparan dengan adanya website.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo dan Kurniasari Tri Amanu (2020) "Transparansi Informasi Pemerintah Daerah melalui Website: Faktor Politik atau Keuangan" peneliti menjadikan penelitian tersebut sebagai keberhasilan dalam memperlihatkan profil kepala daerah, persaingan politik, dan kemandirian daerah mempengaruhi transparansi informasi pemerintah daerah.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti lain yang mana kebaruan dari penelitian ini dilihat dari beberapa aspek yaitu lokasi penelitian yang dilakukan berada di Kabupaten Bangka. Penelitian ini juga dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis SEM. Selanjutnya indikator yang digunakan menggunakan indikator transparansi dari Krina (2003) yang menyatakan transparansi memiliki alat ukur atau indikator yang dapat dipahami yaitu penyediaan informasi yang, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi.

### 1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator transparansi yakni Penyediaan Informasi, Kemudahan Akses Informasi, Mekanisme Pengaduan, dan Peningkatan Arus Informasi terhadap Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Bangka

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis SEM dengan menggunakan dua cara analisis yaitu analisis *outer model* dan analisis *structural model*. Peneliti mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner dengan menggunakan *google form*.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan peneliti tentang pengaruh penyediaan informasi, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi terhadap transparansi informasi publik di Kabupaten Bangka dengan menggunakan teori Krina (2003) dengan melakukan analisis sebagai berikut:

Berdasarkan analisis *outer model* dan analisis *structural model* yang telah dilakukan maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa tiap variabel memiliki nilai *loading factor* yang baik yang sesuai dengan kriteria nilai *loading factor*. Validitas dan reabilitas dari variabel yang ada juga memiliki nilai sesuai dengan melihat hasil analisis *construct reability and validity* dengan kriteria sehingga dapat dikatakan bahwa tiap variabel memiliki validitas dan reabilitas yang baik, selanjutnya untuk validitas konvergen dan validitas diskriminan dari variabel memiliki validitas konvergen dan validitas diskriminan yang baik dengan melihat nilai AVE pada hasil *construct reability and validity* dan *discriminant validity of variables*.

Analisis *struktur model* yang telah dilakukan pada variabel yang diteliti dapat dilihat bahwa nilai T dari tiap variabel X yaitu variabel penyediaan informasi, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan arus informasi yang dihubungkan dengan variabel Y memiliki pengaruh atau variabel X mempengaruhi variabel Y yaitu variabel transparansi informasi, serta P value dari masing-masing variabel yaitu  $< 0,005$  yang berarti nilai kesalahan dari tiap variabel masih dalam toleransi yang berarti variabel-variabel tersebut adalah signifikan.

### 3.1 Penyediaan Informasi terhadap transparansi informasi

Penyediaan informasi berpengaruh terhadap transparansi informasi disebabkan transparansi informasi sendiri adalah kemampuan dalam memberikan akses terhadap informasi yang penting sekaligus mudah dipahami. Dengan memberikan akses kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi masyarakat merasa terlibat dan memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Akan tetapi diperlukan juga komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memastikan informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

Penyediaan informasi yang berpengaruh terhadap transparansi tentu penyediaan informasi yang baik dan juga akurat, hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku penyedia informasi yang tentu diperlukan komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pemerintah dalam proses penyediaan informasi agar selalu tersedia dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara terbuka.

### 3.2 Kemudahan akses informasi terhadap transparansi informasi

Transparansi informasi dapat diartikan sebagai keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi kegiatan pemerintah dalam mengelola sumber daya. Dengan demikian, kemudahan akses informasi dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan badan publik (Susanto, 2017).

Kemudahan akses informasi berpengaruh terhadap transparansi disebabkan kemudahan dalam mengakses informasi dan kemungkinan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang besar, dan kemudahan dalam penyediaan informasi oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna melakukan keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan website dalam segala bentuk informasi yang diperlukan oleh masyarakat (Mutmainnah et al., 2023).

### 3.3 Mekanisme pengaduan terhadap transparansi informasi

Mekanisme pengaduan berpengaruh terhadap transparansi informasi. Penanganan pengaduan diharapkan dapat menangani aduan dari masyarakat dalam pelayanan yang cepat, transparan, dan

akuntabel sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara, serta mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik

Transparansi merupakan hal yang penting dalam tata kelola pemerintahan, akan tetapi dalam praktiknya masih belum berjalan dengan baik ataupun sesuai dengan keinginan. Transparansi sebagai bentuk keterbukaan informasi memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, hal tersebut merupakan perwujudan dari good governance. Tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat dengan adanya transparansi dari pemerintah yang tujuannya adalah sebagai pelayanan publik (Nenabu, 2008). Oleh sebab itu, mekanisme pengaduan yang dalam hal ini mekanisme pengaduan yang transparan dapat meningkatkan transparansi informasi dalam bentuk pelayanan publik.

### **3.4 Arus informasi terhadap transparansi informasi**

Transparansi informasi yaitu prinsip dalam menjamin akses bagi setiap orang dalam memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu dari proses pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan dan juga hasil-hasil yang dicapai. Oleh sebab itu arus informasi berpengaruh terhadap transparansi informasi.

Arus informasi berpengaruh terhadap transparansi karena memungkinkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam melihat kinerja pemerintah maupun badan publik. Akan tetapi faktor lain seperti akuntabilitas, kebebasan komunikasi, dan pengawasan juga bisa mempengaruhi transparansi informasi. Transparansi yang baik mampu meningkatkan partisipasi serta kepedulian masyarakat terhadap pemerintah (Susanto, 2017).

## **IV. Diskusi Temuan Utama**

Analisis data yang dilakukan terhadap indikator transparansi informasi publik yaitu penyediaan informasi, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi menunjukkan hasil yang signifikan dengan masing-masing indikator menunjukkan hasil di atas ketentuan yang berlaku. Dengan demikian indikator penyediaan informasi, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi mempengaruhi transparansi informasi publik di Kabupaten Bangka.

## **V. Diskusi Menarik Lainnya**

Pada pelaksanaan penelitian ditemukan bahwa masyarakat masih acuh terhadap informasi terutama pada pengunjung website PPID Kabupaten Bangka.

## **VI. KESIMPULAN**

Indikator transparansi yang diteliti sudah mampu menjawab hipotesis yang telah dicantumkan, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi mempengaruhi transparansi informasi publik.
2. Kemudahan akses informasi mempengaruhi transparansi informasi publik.
3. Mekanisme pengaduan mempengaruhi transparansi publik.
4. Arus informasi mempengaruhi transparansi informasi publik.

Penyediaan informasi, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan arus informasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi informasi publik di Kabupaten Bangka.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, biaya, dan kurangnya dokumen penelitian

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan transparansi informasi publik di Kabupaten Bangka untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

## **VII. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

### VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Arista, D. (2015). Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah Di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. *Mahassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ....* <https://core.ac.uk/download/pdf/77622167.pdf>
- aKrina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance BPPN*, 1–25.
- Kriyantono, R. (2020). Efektivitas Website Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Penyedia Informasi Bagi Mahasiswa. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal Of Communications Studies)*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.1799>
- Mutmainnah, S., Nor, W., Rahardian, M., & Helmina, A. (2023). *Determinan Tingkat Transparansi Anggaran Melalui Website Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. 5. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art22>
- Nenabu, J. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah*. 49(1), 69–73. [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/bst/publikationen/grauepublikationen/MT\\_Globalization\\_Report\\_2018.pdf](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/bst/publikationen/grauepublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf) [http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India\\_Globalisation%2C Society And Inequalities%28Isero%29.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_Globalisation%2C_Society_And_Inequalities%28Isero%29.pdf) <https://www.quora.com/What-Is-The>
- Puspitasari, A. E. (2019). Penerapan Transparansi Melalui Website (Www.Jakarta.Go.Id) Pemerintah Provinsi Dki Jakarta (Periode Tahun 2017-2018).
- Susanto, E. H. (2017). Transparansi Informasi, Kebebasan Komunikasi Dan Karakteristik Masyarakat. *Mediamorfosa*, 1–19.
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43–60. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>

